

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini beribu kota di Semarang dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa. Jawa Tengah dikenal memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, dengan luas wilayah sekitar 3,25 juta hektare.

2.1.1 Sejarah Jawa Tengah

Sejarah Provinsi Jawa Tengah lahir bersamaan dengan awal kemerdekaan Indonesia, ditandai dengan pelantikan Raden Panji Suroso Condronegoro sebagai gubernur pertamanya pada 19 Agustus 1945. Meskipun demikian, sejarah peradaban di wilayah ini telah berlangsung jauh lebih lama, sejak masa prasejarah hingga berkembangnya berbagai kerajaan besar.

Sejak abad ke-7, kawasan Jawa Tengah menjadi pusat berdirinya berbagai kerajaan berpengaruh. Di antara yang paling awal adalah Kerajaan Kalingga di Jepara yang diperintah oleh Ratu Sima sekitar tahun 674 Masehi. Berdasarkan prasasti Canggal tahun 732, Kerajaan Hindu berdiri di bawah pemerintahan Raja Sanjaya di Medang Kamulan, Jawa Tengah. Selama Dinasti Sanjaya, Rakai Pikatan membangun Candi Rorojonggrang atau Candi Prambanan. Selama era pemerintah Dinasti Syailendra juga lahir Kerajaan Mataram Budha, mereka membangun candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Kalasan serta beberapa candi-candi lainnya.

Memasuki abad ke-16, runtuhnya Kerajaan Majapahit membuka jalan bagi berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Jawa Tengah. Ketika kerajaan Demak mengalami kehancuran, Djoko Tingkir, menantu dari Raja Demak saat itu Sultan Trenggono, memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang yang terletak tidak jauh dari Solo. Ia lalu mengangkat dirinya sebagai Raja Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Adiwijaya. Sepanjang masa pemerintahannya, berbagai kerusuhan dan pemberontakan kerap terjadi. Pertarungan terbesar berlangsung antara Sultan Adiwijaya dan Aryo Panangsang. Untuk mengatasi pemberontakan yang dipimpin Aryo Panangsang, Sultan Adiwijaya mengutus Danang Surowijaya yang berhasil mengalahkan dan membunuh Aryo Panangsang. Berkat kombinasinya yang signifikan bagi Kerajaan Pajang, Sultan Adiwijaya menganugerahi tanah Mataram kepada Sutowijaya. Setelah kejatuhan Pajang, ia diangkat sebagai Raja Mataram Islam pertama di Jawa Tengah dengan sebutan Panembahan Senopati.

Pada pertengahan abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa mulai memasuki Nusantara. Melalui kongsi dagang VOC, Belanda memperkuat cengkeramannya atas Indonesia, termasuk Jawa Tengah, baik dalam aspek politik maupun ekonomi. Krisis suksesi Kerajaan Mataram pasca wafatnya Sri Sultan Pakubuwono II diperparah oleh intervensi kolonial Belanda, hingga diselesaikan melalui Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membelah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Pada era kolonial Belanda, menurut Undang-Undang mengenai Desentralisasi Pemerintah di Hindia Belanda (Desentralisate Wet 1903), struktur pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi menjadi *gewest* (keresidenan),

afdeeling/regentschap (kabupaten), *district/ standgeemete* (kotapraja), dan *oderdistrict* (kecamatan). Ketika Jepang menguasai Indonesia dan Belanda pada tahun 1942, mereka melakukan penyesuaian dalam sistem pemerintahan daerah. Penyesuaian tersebut mengelompokkan seluruh Jawa, kecuali Vorstenkendezh (kerajaan-kerajaan), menjadi wilayah syuu (keresidenan), si (kotapraja), ken (kabupaten), gun (distrik), son conder distrik, dan ku (kelurahan).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamkan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Pada fase awal kemerdekaan, Indonesia hanya memiliki delapan provinsi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang paling tua di Indonesia.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Raden Panji Suroso Condronegoro diangkat sebagai gubernur pertama untuk wilayah Jawa Tengah. Setelah meraih kemerdekaan, keadaan di Indonesia masih belum sepenuhnya stabil, dan masyarakat terpaksa berhadapan dengan pasukan asing. Selama periode tersebut, beberapa peristiwa penting terjadi di Jawa Tengah, diantaranya adalah Pertempuran Lima Hari Semarang dan Pertempuran Ambarawa. Setelah situasi di Indonesia lebih baik, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 diundangkan untuk membentuk Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, pembentukan Provinsi Jawa Tengah mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Provinsi ini memiliki luas 3,25 juta

hektare (sekitar 25,04 persen dari total Pulau Jawa) dan terdiri dari 29 kabupaten serta enam kota. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004, tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan sebagai hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2 Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak pada koordinat $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur, mencakup wilayah Pulau Karimunjawa. Jawa Tengah memiliki luas sekitar 3,34 juta hektar, yang setara dengan 25,04% dari luas Pulau Jawa atau sekitar 1,7% dari total luas Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota Semarang. Secara administratif, Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, serta Laut Jawa di sebelah utara. Wilayah Jawa Tengah mencakup 29 kabupaten dan 6 kota, dengan total 576 kecamatan, serta 753 kelurahan dan 7810 desa.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Jawa Tengah



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2013

Dari sisi topografi, Provinsi Jawa Tengah memiliki variasi bentang alam yang cukup beragam. Bagian tengah wilayah didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi, sementara dataran rendah lebih banyak dijumpai di kawasan pesisir dan sejumlah wilayah lainnya. Sekitar 53 % luas wilayah Jawa Tengah berada pada ketinggian antara 0 hingga 99 meter di atas permukaan laut. Ditinjau dari kemiringan lahan, sebesar 38 persen wilayah memiliki kemiringan 0–2%, 31% berkemiringan 2–15%, 19% berkemiringan 15–40%, dan sisanya sekitar 12% memiliki kemiringan di atas 40%. Dari aspek klimatologi, berdasarkan data Stasiun Klimatologi Kelas I Semarang, suhu udara rata-rata di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 berkisar antara 28,2°C hingga 30,0°C, dengan wilayah-wilayah yang berdekatan dengan garis pantai cenderung mencatatkan suhu yang lebih tinggi. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 67% hingga 84%. Intensitas curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Geofisika Banjarnegara sebesar 3.413,7 mm,

sedangkan frekuensi hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap dengan 220 hari hujan dalam setahun.

2.1.3 Kondisi Demografis

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2025 mencapai 38,23 juta jiwa yang terdiri atas 19,20 juta jiwa penduduk laki-laki dan 19,03 juta jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 0,97 persen. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,9. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2025 mencapai 1.113 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.324 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 467 jiwa/km².

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribuan)	Penduduk (Perempuan) (Ribuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribuan)
0-4	1.453.486	1.395.492	2.848.978
5-9	1.378.005	1.314.670	2.692.675
10-14	1.388.617	1.324.616	2.713.233
15-19	1.434.037	1.349.663	2.783.700
20-24	1.453.872	1.371.580	2.825.452
25-29	1.488.450	1.405.197	2.893.647

30-34	1.478.667	1.407.466	2.886.133
35-39	1.457.127	1.406.076	2.863.203
40-44	1.404.285	1.376.799	2.781.084
45-49	1.344.073	1.352.647	2.696.720
50-54	1.229.032	1.260.829	2.489.861
55-59	1.100.859	1.156.162	2.257.021
60-64	920.100	984.473	1.904.573
65-69	721.747	779.311	1.501.058
70-74	500.418	558.377	1.058.795
75+	450.659	587.141	1.037.800
Jumlah/ Total	19.203.434	19.030.499	38.233.933

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi demografis Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan bahwa provinsi ini berada dalam fase bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga sekitar tahun 2035. Pada periode tersebut, proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai sekitar 65–70% dari total populasi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, yaitu anak-anak (0–14 tahun) dan lansia (65 tahun ke atas). Dominasi kelompok usia produktif ini mencerminkan adanya potensi signifikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan dinamika pembangunan sosial yang lebih optimal.

Namun, pemanfaatan bonus demografi tidak secara otomatis menjamin kemajuan ekonomi maupun sosial. Kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan, penguasaan keterampilan kerja, serta tersedianya kesempatan kerja yang memadai menjadi faktor determinan dalam mengoptimalkan manfaat dari struktur demografis tersebut. Di samping itu, meskipun proporsi penduduk lansia relatif lebih kecil dibandingkan kelompok produktif, jumlah mereka mengalami peningkatan, terutama pada perempuan di atas usia 70 tahun. Oleh karena itu, penyediaan layanan kesehatan yang memadai serta jaminan sosial bagi kelompok lansia tetap menjadi aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan. Secara keseluruhan, kondisi demografis Jawa Tengah pada tahun 2025 menampilkan peluang strategis sekaligus tantangan bagi pembangunan ekonomi dan sosial, yang menuntut perumusan kebijakan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih rinci, data jumlah penduduk menurut kelompok usia dan jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok usia muda memiliki proporsi yang cukup dominan dalam struktur penduduk. Kelompok usia 15–19 tahun tercatat sebanyak 2.783.700 jiwa, usia 20–24 tahun sebanyak 2.825.452 jiwa, usia 25–29 tahun sebanyak 2.893.647 jiwa, usia 30–34 tahun sebanyak 2.886.133 jiwa, dan usia 35–39 tahun sebanyak 2.863.203 jiwa. Dengan demikian, total penduduk pada rentang usia 15–39 tahun mencapai lebih dari 14 juta jiwa, yang menunjukkan besarnya proporsi generasi muda dalam komposisi demografis Jawa Tengah. Kelompok usia ini merupakan bagian dari penduduk usia produktif yang secara politik juga telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum.

Besarnya proporsi penduduk usia 15–39 tahun tersebut memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks politik elektoral, mengingat kelompok ini merupakan pemilih potensial yang dapat menentukan arah preferensi politik dan hasil kontestasi demokrasi. Pemilih muda tidak hanya menjadi objek mobilisasi politik, tetapi juga memiliki potensi sebagai aktor yang aktif dalam membentuk opini publik dan dinamika politik. Oleh karena itu, karakteristik generasi muda yang cenderung dinamis, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki akses luas terhadap informasi menjadikan mereka sebagai kelompok strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan pendidikan politik.

Sejalan dengan hal tersebut, besarnya jumlah pemilih muda menuntut partai politik untuk merumuskan strategi pendidikan politik yang lebih adaptif dan kontekstual. Generasi muda cenderung memperoleh informasi politik dengan memanfaatkan media digital, sehingga pendekatan pendidikan politik yang bersifat konvensional perlu dikombinasikan dengan metode yang lebih inovatif, partisipatif, dan berbasis teknologi. Pendidikan politik yang efektif di kalangan generasi muda diharapkan mampu meningkatkan literasi politik, membentuk kesadaran kritis, serta mendorong partisipasi politik yang rasional dan bertanggung jawab. Partai dituntut untuk mampu merancang dan mengimplementasikan program pendidikan politik yang mampu menjangkau semua generasi termasuk melibatkan generasi muda secara optimal. Upaya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana sosialisasi nilai dan ideologi partai, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat.

2.2 Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Gambar 2. 2 Logo PDI Perjuangan



Sumber: Web PDI Perjuangan, 2026

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia yang memiliki akar sejarah panjang dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Partai ini berawal dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir. Soekarno pada 4 Juli 1927 dengan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Seiring dengan perubahan sistem politik pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik yang menyebabkan bergabungnya beberapa partai, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik menjadi satu wadah baru bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

Perkembangan politik di era reformasi kemudian mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam tubuh PDI. Di bawah kepemimpinan Megawati

Soekarnoputri, partai ini resmi berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada 1 Februari 1999. Sejak saat itu, PDI Perjuangan menegaskan dirinya sebagai partai berideologi Pancasila dan nasionalisme yang berkomitmen memperjuangkan kedaulatan rakyat serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Selain itu, PDI Perjuangan juga mengusung nilai-nilai keadilan sosial, kedaulatan politik, swasembada ekonomi, dan pelestarian budaya Indonesia. Arah demokrasi partai ini berfokus pada prinsip-prinsip marhaenisme yang diajarkan oleh Soekarno, dengan tekad memperjuangkan hak-hak rakyat kecil dan mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan.

Sebagai perwujudan dari komitmen ideologis dan perjuangan politiknya, PDI Perjuangan merumuskan visi dan misi yang menjadi landasan arah gerak partai. PDI Perjuangan merumuskan visi dan misi partai sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar partai. Secara visioner berdasarkan Pasal 6, partai memposisikan dirinya sebagai instrumen perjuangan untuk membangun karakter bangsa berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945, menghidupkan semangat gotong royong, serta membentuk kader bangsa berjiwa pelopor yang mampu mengamalkan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun misi partai sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 hingga 10 mencakup empat dimensi. Berdasarkan Pasal 7, tujuan umum partai diarahkan pada perwujudan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam bentuk masyarakat adil dan makmur yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pasal 8 memuat tujuan khusus yang berorientasi pada pembangunan gerakan politik berbasis kekuatan rakyat, pemenuhan hak-hak

dasar masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta perolehan kekuasaan secara konstitusional sebagai alat mewujudkan amanat UUD 1945. Pasal 9 mengatur fungsi partai yang mencakup pendidikan politik rakyat, rekrutmen dan pembentukan kader berjiwa pelopor, penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembangunan partisipasi dan komunikasi politik yang bermakna. Sementara itu, Pasal 10 menetapkan tugas partai yang meliputi pemertahanan dan penyebarluasan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Bung Karno, persiapan kader untuk jabatan politik dan publik, serta pengawasan penyelenggaraan negara agar senantiasa berlandaskan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 1945.

2.2.1 Sejarah dan Ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia yang memiliki akar historis kuat dalam perkembangan demokrasi nasional. Secara historis, kemunculan partai ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian yang diterapkan pemerintah pada masa Orde Baru. Melalui kebijakan fusi partai politik tahun 1973, pemerintah menggabungkan sejumlah partai politik yang berhaluan nasionalis dan non-islam, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Murba menjadi satu wadah baru bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan menyederhanakan sistem kepartaian. Namun dalam praktiknya kebijakan ini juga

dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap aktivitas politik masyarakat.

Dalam perkembangannya, PDI menghadapi berbagai dinamika internal yang kompleks, terutama berkaitan dengan konflik kepemimpinan antara Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri. Perselisihan yang muncul pada awal dekade 1990-an menjadi salah satu momentum penting dalam sejarah perkembangan partai tersebut. Pada Kongres Luar Biasa di Medan pada tahun 1993 menetapkan posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Namun, pemerintah Orde Baru kemudian melakukan intervensi terhadap hasil kongres melalui pengangkatan Soerjadi sebagai Ketua Umum versi pemerintah. Intervensi tersebut memicu perpecahan di dalam tubuh partai dan memperparah konflik hingga terjadi konflik internal partai. Ketegangan ini memuncak pada peristiwa 27 Juli 1996 ketika kantor Dewan Pemimpin Pusat (DPP) PDI di Jakarta diserbu oleh kelompok yang menolak kepemimpinan Megawati. Peristiwa tersebut tidak hanya menandai titik balik bagi sejarah partai, tetapi juga memperkuat citra Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap rezim otoritarian pada masa itu. Momentum inilah yang kemudian melahirkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai partai baru yang menegaskan identitas ideologisnya sebagai partai yang berhaluan nasionalis dan demokratis.

Pasca reformasi 1998, PDI Perjuangan muncul sebagai kekuatan politik utama yang berhasil merebut simpati publik melalui figur kepemimpinan Megawati serta narasi semangat perjuangan yang berpihak pada rakyat. Pada Pemilihan

Umum tahun 1999, PDI Perjuangan tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, menandai kebangkitan partai ini di era demokrasi pasca reformasi. Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang sarat dengan nilai-nilai nasionalisme dan warisan ideologis Soekarno berhasil mempertahankan basis dukungan yang kuat, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Bali. Sejak saat itu, PDI Perjuangan secara konsisten menjadi salah satu partai dengan pengaruh signifikan dalam setiap kontestasi politik nasional.

Secara ideologis, PDI Perjuangan berlandaskan pada nilai-nilai nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial yang berakar pada ajaran Marhaenisme yang diperkenalkan oleh Soekarno. Partai ini memandang politik sebagai instrumen perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional. Dalam perkembangannya, PDI Perjuangan mengalami transformasi menjadi partai modern dengan kelembagaan yang semakin terstruktur dan jaringan politik yang meluas hingga tingkat akar rumput, baik di tingkat nasional maupun daerah. Komitmen yang teguh dalam menjaga orientasi ideologi nasionalis serta kedekatan partai terhadap aspirasi masyarakat menjadi landasan kokoh yang menopang eksistensi PDI Perjuangan sebagai salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam konstelasi perpolitikan Indonesia.

2.2.2 Struktur Organisasi dan Kepemimpinan PDI Perjuangan

Tabel 2. 2 Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2025-2030

NO	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Dolfie Othinel Frederic Palit
2.	Sekretaris	Sumanto
3.	Wakil Sekretaris Internal	Agustina Wilujeng Pramestuti
4.	Wakil Sekretaris Bidang Program	Eko Susilo
5.	Bendahara	Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
6.	Wakil Bendahara	Dede Indra Permana
7.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	Bambang Hariyanto
8.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif	Joko Sutopo
9.	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	Sarno
10.	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
11.	Wakil Ketua Bidang Sumber Daya	Harris Turino
12.	Wakil Ketua Bidang Politik	Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
13.	Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah	Etik Suryani
14.	Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi	Sofwan Dedy Ardyanto
15.	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan	Dyah Kartika Permanasari
16.	Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional	Krisseptiana
17.	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Kesehatan Perempuan dan Anak	Dr. Messy Widiastuti
18.	Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM	Denny Nurcahyanto
19.	Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial	Dasum
20.	Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Masan
21.	Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	Juli Krisdianto

22.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital	Eistianah
23.	Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan	Taufik Nur Hidayat
24.	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi	Yohanes Winarto
25.	Wakil Ketua Bidang Perekonomian	Nok Farhatun

Sumber: Web Perjuangan Jateng, 2025

2.2.3 Basis Sosial dan Kekuatan Politik PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) memiliki basis sosial dan kekuatan politik yang relatif kuat di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu daerah dengan tingkat dukungan elektoral yang paling konsisten terhadap PDI Perjuangan sejak era reformasi. Secara historis, dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari karakter sosial dan kultur masyarakat yang cenderung berhaluan nasionalis. Selain itu, terdapat kedekatan ideologis dengan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial yang menjadi landasan perjuangan partai. Identitas partai yang menonjolkan figur Soekarno serta ajaran marhaenisme turut memperoleh resonansi yang kuat di masyarakat Jawa Tengah, terutama pada kelompok masyarakat pedesaan dan kalangan kelas menengah ke bawah yang memiliki kedekatan emosional dengan simbol-simbol perjuangan rakyat.

Kekuatan elektoral PDI Perjuangan di Jawa Tengah dapat ditinjau melalui perolehan suara dan jumlah kursi dalam berbagai kontestasi elektoral, baik pada pemilihan eksekutif maupun pemilihan legislatif. Berikut merupakan perolehan suara PDI Perjuangan dalam Pemilihan Legislatif di Jawa Tengah:

Tabel 2. 3 Hasil Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan pada Pemilu Legislatif 2014, 2019, dan 2024

Tahun	Perolehan Suara	Jumlah Kursi
2014	24,94%	32 kursi
2019	29,71%	42 kursi
2024	26,95%	33 kursi

Sumber: Data diolah penulis dari KPU Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan Data pada tabel perolehan suara dan jumlah kursi PDI Perjuangan tahun 2014, 2019, dan 2024 memperlihatkan adanya pola fluktuasi dukungan elektoral. Kenaikan signifikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 29,71% dengan 42 kursi diikuti oleh penurunan pada tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 26,95% dengan jumlah kursi sebanyak 33 menunjukkan bahwa basis dukungan partai tidak sepenuhnya stabil. Perubahan tersebut mencerminkan adanya dinamika preferensi pemilih serta meningkatnya kompetisi antar partai dalam memperebutkan basis suara di Jawa Tengah. Situasi ini memberikan indikasi bahwa dominasi politik tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan seiring perkembangan konteks politik dan sosial.

Secara struktural, kekuatan PDI Perjuangan tetap ditopang oleh jaringan organisasi yang relatif solid hingga tingkat akar rumput, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga struktur ranting di tingkat desa. Keberadaan organisasi sayap dan komunitas pendukung juga berperan dalam menjaga konsolidasi kader serta mobilisasi politik di daerah. Meskipun demikian, dinamika penurunan perolehan kursi pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa kekuatan struktural tersebut tidak sepenuhnya mampu mempertahankan

tingkat dukungan elektoral secara maksimal, sehingga memerlukan strategi adaptasi yang lebih responsif terhadap perubahan karakteristik pemilih.

2.2.4 Program Pendidikan Politik

Gambar 2. 3 Pendidikan Politik oleh PDI Perjuangan



Sumber : Media Sosial PDI Perjuangan Jawa Tengah, 2026

Pendidikan politik yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan merupakan salah satu instrumen strategis dalam membangun kapasitas kader sekaligus menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Melalui pendidikan politik, partai berupaya memberikan pemahaman politik yang lebih komprehensif mengenai dinamika kehidupan politik sekaligus menumbuhkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Secara konseptual, pendidikan politik PDI Perjuangan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman terhadap ideologi Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, serta prinsip kepemimpinan

yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Selain itu, pendidikan politik juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya partisipasi politik yang bertanggung jawab dan berlandaskan pada etika demokrasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan pendidikan politik dilaksanakan secara sistematis melalui berbagai metode yang beragam, seperti seminar, lokakarya, diskusi publik, dan pelatihan kader. Berbagai kegiatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas intelektual sekaligus keterampilan praktis kader dalam menjalankan aktivitas politik. Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan secara berkala dengan metode tatap muka maupun platform digital, sehingga jangkauan peserta dapat diperluas dan efektivitas pembelajaran dapat ditingkatkan.

Sebagai komponen inti dari pendidikan politik partai, PDI Perjuangan mengembangkan program sekolah kader yang dirancang secara berjenjang. Program ini bertujuan untuk membentuk kader yang memiliki komitmen ideologis yang kuat, kompetensi politik yang memadai, serta kesiapan untuk terlibat dalam praktik politik secara langsung. Sekolah kader ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu tingkat dasar, menengah, dan lanjutan, dengan kurikulum yang disusun secara sistematis. Materi yang diberikan mencakup penguatan ideologi Pancasila, penanaman nilai-nilai kebangsaan, strategi pengelolaan organisasi partai, teknik komunikasi politik, kepemimpinan praktis, serta penerapan nilai-nilai partai dalam kehidupan sosial. Peserta yang terlibat dalam program Sekolah Kader berasal dari beragam latar belakang, mulai dari kader yang baru bergabung hingga kader aktif yang tengah dipersiapkan untuk menempati posisi-posisi strategis dalam struktur organisasi partai, baik di tingkat daerah maupun nasional. Proses pembelajaran

dilaksanakan melalui berbagai metode yang saling melengkapi, antara lain pelatihan intensif, lokakarya, seminar, diskusi kelompok, dan simulasi politik. Pendekatan tersebut dirancang agar peserta tidak sekadar memperoleh pemahaman yang bersifat teoretis, melainkan juga mampu mengembangkan kecakapan praktis yang relevan dengan dinamika aktivitas politik. Melalui pola penyelenggaraan yang sistematis, berjenjang, dan berkesinambungan, program Sekolah Kader difungsikan sebagai wahana konsolidasi internal partai sekaligus penguatan jaringan kader di seluruh wilayah Indonesia.

Pada tingkat regional, pelaksanaan pendidikan politik PDI Perjuangan disesuaikan dengan kondisi sosial dan politik di masing-masing daerah. Pendidikan politik di tingkat daerah, terutama di Jawa Tengah, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan kader aktif serta anggota Komunitas Juang dari berbagai kabupaten dan kota. Materi yang disampaikan di tingkat regional tetap menekankan penguatan ideologi partai, pengembangan strategi organisasi, komunikasi politik, serta kepemimpinan lokal, namun dilakukan penyesuaian agar relevan dengan konteks lokal. Kegiatan pendidikan politik ini diharapkan dapat membekali kader dengan kemampuan praktis dan pemahaman politik yang memadai, memperkuat jaringan internal, serta menumbuhkan kesadaran politik yang kritis di kalangan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat dapat ditingkatkan secara aktif, bertanggung jawab, dan konstruktif, serta nilai-nilai PDI Perjuangan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial-politik secara nyata.

2.3 Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Gambar 2. 4 Logo Partai Keadilan Sejahtera



Sumber: Web Partai Keadilan Sejahtera, 2026

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik Indonesia yang memiliki akar historis dari gerakan dakwah kampus yang berkembang sejak dekade 1980-an. Gerakan tersebut kemudian melahirkan Partai Keadilan (PK) sebagai cikal bakal terbentuknya PKS. Partai Keadilan resmi didirikan pada 20 Juli 1998 melalui konferensi pers di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dengan Nurmahmudi Isma'il sebagai presiden pertama. Dalam perkembangan awalnya, Partai Keadilan berhasil memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilihan Umum 1999 dan turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui penawaran posisi kementerian dalam kabinet Presiden Abdurrahman Wahid. Seiring dengan pengangkatan Nurmahmudi Isma'il sebagai menteri, kepemimpinan partai kemudian dialihkan kepada Hidayat Nur Wahid yang ditetapkan sebagai presiden partai pada 21 Mei 2000. Perubahan signifikan dalam perjalanan organisasi ini terjadi ketika Partai Keadilan melakukan transformasi kelembagaan dengan

mengubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2002. Perubahan tersebut dilakukan agar partai dapat berpartisipasi secara lebih luas dalam kontestasi politik nasional, sekaligus memperkuat identitasnya sebagai partai yang berlandaskan nilai-nilai Islam namun tetap berkomitmen pada prinsip demokrasi dan ideologi Pancasila.

Sejak terlibat dalam dinamika politik nasional, PKS secara konsisten berpartisipasi dalam berbagai pemilihan umum dan konsisten mempertahankan eksistensinya sebagai partai Islam modern dengan sistem kaderisasi yang terstruktur. Partai ini dikenal memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan masyarakat perkotaan dan generasi muda muslim, serta berperan aktif dalam isu sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemberantasan korupsi. Dalam praktik politiknya, PKS menghadapi dinamika antara upaya mempertahankan idealisme nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan pragmatisme dalam membangun koalisi politik lintas ideologi guna memperoleh akses terhadap kekuasaan. Meskipun demikian, PKS tetap berusaha mempertahankan identitasnya sebagai partai yang menekankan moralitas keislaman dalam aktivitas politiknya. Seperti halnya partai politik lainnya, PKS juga memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tujuan dan arah perjuangan partai. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merumuskan visi partai dalam dokumen resmi partai tahun 2020–2025 sebagai partai Islam *rahmatan lil 'alamin* yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi tersebut mencerminkan orientasi PKS dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pelayanan kepada

masyarakat, bangsa, dan negara melalui penguatan peran partai dalam kehidupan politik nasional.

Adapun misi partai mencakup empat dimensi yang saling berkaitan. Pertama, penguatan dan pertumbuhan keanggotaan partai yang diarahkan untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kedua, konsolidasi organisasi partai yang berskala nasional, mandiri, dan terbuka dengan penerapan sistem manajemen modern guna meningkatkan fungsi edukasi, advokasi, dan kaderisasi kepemimpinan. Ketiga, peningkatan peran partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap ketahanan keluarga, kepentingan pemuda, masyarakat, serta lingkungan hidup secara berkelanjutan. Keempat, upaya memenangkan kontestasi elektoral sekaligus mendorong kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berkontribusi dalam pengembangan demokratisasi di tingkat regional dan kerja sama internasional.

2.3.1 Sejarah dan Ideologi Partai

PKS secara resmi dideklarasikan pada 20 April 2002 di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta. Pada tahun yang sama, PKS memperoleh pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu, partai PKS dinyatakan lolos dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga berhak berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.

Pada Pemilu 2004 PKS berhasil memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan menjadi partai yang berhak mengirim para wakilnya menjadi anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Pada pemilu-pemilu berikutnya, PKS berhasil melampaui ambang batas parlemen dan mengirimkan wakilnya ke DPR dan MPR. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS bergabung dalam koalisi pemerintahan melalui penempatan kadernya di Kabinet Indonesia Bersatu I dan II.

Pasca Pemilu tahun 2014, PKS mengambil peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, menempatkan diri sebagai kekuatan kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Secara elektoral, sejak mengikuti Pemilu tahun 2004 hingga 2019, PKS menunjukkan tren peningkatan perolehan suara dengan persentase yang umumnya berada di atas tujuh persen. Meskipun pada Pemilu 2014 terjadi sedikit penurunan persentase suara menjadi 6,79 persen, secara absolut jumlah suara yang diperoleh tetap mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2009, yaitu dari 8.206.955 suara menjadi 8.480.204 suara.

Perkembangan organisasi partai juga tercermin dari perubahan kepemimpinan yang terjadi dalam Musyawarah Nasional (Munas) V PKS yang diselenggarakan pada November 2020. Dalam forum tersebut ditetapkan kepemimpinan baru PKS periode 2020–2025 dengan Habib Dr. Salim Segaf Al Jufri, M.A. sebagai Ketua Majelis Syura dan H. Ahmad Syaikhul sebagai Presiden Partai. Kepemimpinan baru ini membawa semangat baru dengan mengusung visi

PKS menjadi partai yang *rahmatan lil 'alamin*. Seiring dengan perubahan tersebut, partai juga melakukan sejumlah penyesuaian simbolik, seperti perubahan lambang partai serta pembaruan mars dan hymne partai sebagai bagian dari upaya revitalisasi identitas organisasi.

Secara ideologis, PKS berlandaskan pada nilai-nilai Islam sebagai fondasi pembentukan partai. Statuta PKS menetapkan bahwa dasar ideologisnya adalah Islam dan tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi Indonesia yang diridhai Allah (Statuta Dasar PKS, Pasal 2 ayat 5). Frasa tujuan politik PKS pada dasarnya merupakan bentuk penerjemahan secara sastra terhadap kearifan tradisional mengenai tujuan ideal politik Islam atau *Baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Oleh karena itu, PKS melihat konteks sejarahnya dengan menghadapi tantangan rezim otoriter dan diktator, serta memandang Islam sebagai solusi terhadap berbagai tantangan tersebut, atau dengan kata lain menempatkan Islam sebagai ideologi yang berorientasi pada pembebasan dan demokratisasi (Permata, 2008: 126). Partai Keadilan Sejahtera memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan partai-partai berbasis Islam lainnya, baik dari aspek historis, ideologis, tujuan politik, maupun basis sosial pemilihnya. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari latar belakang kemunculannya yang berakar pada gerakan dakwah kampus yang berkembang sejak dekade 1970-an di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Gerakan ini menekankan Islam sebagai sistem kehidupan komprehensif yang mengatur aspek spiritual sekaligus sosial dan politik. Perkembangan gerakan dakwah tersebut turut mendorong berkembangnya ide dan aktivisme Ikhwanul

Muslimin yang mengadopsi nama *tarbiya* (pendidikan Islam) yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan identitas dan orientasi politik partai.

Dalam perkembangannya, orientasi ideologis partai mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika sistem politik di Indonesia. Meskipun pada awalnya lebih menekankan pada nilai-nilai Islam secara normatif, partai ini kemudian mengintegrasikan Pancasila sebagai bagian dari ideologi yang dianut secara formal. Pergeseran ini menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap konteks kebangsaan dan sistem politik yang berlaku, sekaligus menandai transformasi dari pendekatan ideologis yang eksklusif menuju posisi yang lebih inklusif dalam kerangka negara bangsa. Penerimaan terhadap Pancasila juga mencerminkan strategi politik untuk memperluas jangkauan elektoral serta meningkatkan legitimasi di tengah masyarakat yang plural.

Penekanan terhadap nilai-nilai nasionalisme dan ideologi negara memiliki signifikansi penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Pancasila diposisikan sebagai dasar pemersatu yang mampu mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan agama. Dalam praktiknya, meskipun partai ini memiliki kedekatan dengan nilai-nilai Islam, pendekatan yang digunakan tidak selalu diwujudkan dalam bentuk tuntutan formal terhadap penerapan hukum syariah melalui kebijakan negara. Sebaliknya, terdapat kecenderungan untuk mendorong penanaman nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif.

Di sisi lain, orientasi politik partai juga menunjukkan kecenderungan pada nilai-nilai moral yang bersifat konservatif, yang tercermin dalam berbagai sikap dan agenda kebijakan yang diusung. Isu-isu seperti penolakan terhadap pornografi serta dukungan terhadap penegakan hukum yang tegas dalam kasus narkoba menjadi bagian dari narasi politik yang dikembangkan. Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa sebagian agenda politik yang diperjuangkan masih berkaitan dengan aspirasi penerapan nilai-nilai syariat Islam, meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam kerangka formal negara. Hal ini menunjukkan adanya dinamika internal antara upaya adaptasi terhadap sistem politik nasional dengan keberlanjutan nilai-nilai ideologis yang menjadi akar pembentukan partai.

Kemudian, mengenai ideologi partai politik di Indonesia, Aspinall, Muhtadi, Fossati, dan Warburton (2018) melakukan survei untuk mengkaji arah ideologi partai politik di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak partai Islam, partai politik Islam di Indonesia membedakan diri melalui indikator orientasi Islam atau pendekatan pluralis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) merupakan partai yang paling inklusif. PDI Perjuangan cenderung mendapatkan dukungan dari minoritas agama dan kelompok Islam abangan. Di ujung spektrum ideologis terdapat partai-partai Islam konservatif seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Konstituennya biasanya merupakan kelompok yang puritan dan berasal dari penduduk kelas menengah kota. Partai Islam lain yang signifikan, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di tengah spektrum. Indikasinya karena PKB terkait dengan Nahdlatul Ulama (NU),

yang memiliki orientasi tradisional. Prinsip ini membuat PKB lebih toleran terhadap keragaman agama dan budaya. Sebagian besar partai politik kontemporer lainnya memiliki dukungan yang beragam secara ideologis, termasuk Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Terlepas dari pentingnya perbedaan antara Islam dan pluralisme, kompetisi elektoral di Indonesia pada sebagian besar periode pemilu berlangsung tanpa konflik yang berbasis ideologis. Partai-partai politik juga menunjukkan kecenderungan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan dengan berbagai jenis partai lain tanpa mempersoalkan orientasi ideologis masing-masing demi mencapai kemenangan elektoral (Warburton, 2020).

2.3.2 Struktur Organisasi dan Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera

Tabel 2. 4 Susunan anggota Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Jawa Tengah masa bakti 2025-2030 yang telah ditetapkan:

No	Nama	Jabatan
1.	Budhi Hartanto	Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW)
2.	Mutammam Hasani	Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW)
3.	Hadi Santoso	Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
4.	Julisa Ramadhan	Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
5.	Narso	Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
6.	Abdul Ghofar Ismail	Ketua Bidang Kaderisasi
7.	Rois Rahma Fathoni	Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW)
8.	Sururul Fuad	Sekretaris Dewan Syariah Wilayah (DSW)

Sumber: Web PKS, 2026

2.3.3 Basis Sosial dan Kekuatan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Basis sosial dan kekuatan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Provinsi Jawa Tengah terbentuk melalui kombinasi antara kaderisasi internal yang sistematis, penguatan jaringan sosial, serta perluasan basis dukungan politik pada berbagai segmen masyarakat. Meskipun secara historis PKS dikenal sebagai partai berbasis Islam, dalam perkembangannya partai ini berupaya memperluas basis dukungan politiknya kepada kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk kalangan generasi muda. Kaderisasi internal PKS diakui sebagai kekuatan utama partai, dengan penekanan pada pembinaan anggota melalui pelatihan, sekolah kader, dan kegiatan konsolidasi struktur hingga tingkat daerah. Pendekatan ini memperlihatkan adanya transformasi strategi politik dari yang bersifat segmentatif menuju pola yang lebih inklusif.

Kaderisasi internal menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan kekuatan politik PKS. Pola pembinaan anggota yang terstruktur melalui pelatihan, pendidikan kader, serta konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah membentuk jaringan politik yang relatif solid. Selain itu, aktivitas pelayanan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan turut memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat. Program-program yang berorientasi pada pemberdayaan sosial, bantuan kemanusiaan, serta edukasi publik menjadi instrumen dalam membangun citra partai yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya pada tahun 2025, PKS Jateng mengencarkan gerakan *Nguwongke Wong* yang menekankan pendekatan humanis dan pelayanan langsung kepada rakyat. Di sisi lain, PKS juga memperkuat basis ideologinya dengan tetap berpegang pada nilai-

nilai Islam, sembari mengadopsi pendekatan moderat dalam kegiatan politik. Aktivitas keagamaan dan edukatif seperti *Walisongo Movement* menjadi sarana partai untuk mendekati diri dengan masyarakat Jawa melalui pendekatan budaya dan sejarah lokal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan PKS bertumpu pada aspek ideologis sekaligus praktik sosial yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Secara politik, posisi PKS di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berikut merupakan perolehan suara PDI Perjuangan dalam Pemilihan Legislatif di Jawa Tengah:

Tabel 2. 5 Hasil Perolehan Suara Partai PKS pada Pemilu Legislatif 2014, 2019, dan 2024

Tahun	Perolehan Suara	Jumlah Kursi
2014	6,14%	10 kursi
2019	5,75%	10 kursi
2024	8,18%	11 kursi

Sumber: Data diolah penulis dari KPU Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data Tabel perolehan suara dan jumlah kursi PKS pada tahun 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan dinamika yang berbeda dibandingkan dengan partai dominan. Penurunan suara pada 2019 diikuti oleh peningkatan pada 2024 mencerminkan adanya efektivitas strategi adaptasi politik yang dilakukan partai dalam merespons perubahan preferensi pemilih. Peningkatan tersebut juga mengindikasikan keberhasilan PKS dalam memperluas basis dukungan, khususnya di kalangan pemilih muda dan masyarakat perkotaan yang menjadi segmen penting dalam struktur demografis Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, basis sosial dan politik PKS di Jawa Tengah dibangun di atas fondasi ideologi Islam yang moderat, strategi kaderisasi yang sistematis, dan program pelayanan masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan publik. Strategi politik adaptif yang dikombinasikan dengan pendekatan humanis menjadi modal utama PKS dalam memperluas pengaruhnya di provinsi ini, terutama di kalangan pemilih muda dan kelompok masyarakat perkotaan.

Basis sosial dan kekuatan politik PKS pada akhirnya menunjukkan karakter yang dinamis, dengan kecenderungan penguatan dalam beberapa periode terakhir. Pola ini menempatkan PKS sebagai salah satu kekuatan politik yang mengalami perkembangan di Jawa Tengah, terutama dalam konteks persaingan dengan partai-partai besar. Perkembangan tersebut menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan strategi pendidikan politik yang diterapkan dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024.

2.3.4 Program Pendidikan Politik

Gambar 2. 5 Pendidikan Politik oleh PKS



Sumber: Media Sosial PKS Jawa Tengah, 2025

Pendidikan politik oleh PKS merupakan instrumen strategis yang diarahkan untuk membentuk kesadaran politik masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas kader. Secara konseptual, pendidikan politik PKS mencakup pemahaman terhadap ideologi partai, prinsip kepemimpinan berbasis keadilan sosial, mekanisme partisipasi politik, serta hak dan kewajiban warga negara. Pelaksanaan pendidikan politik dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain pelatihan kader (training orientasi partai), seminar, lokakarya, diskusi publik, serta safari politik yang melibatkan pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah. Materi disusun secara sistematis sesuai dengan tingkat peserta, mulai dari pemahaman dasar politik untuk masyarakat umum hingga pengembangan kapasitas kepemimpinan dan strategi organisasi bagi kader aktif. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala

dengan kombinasi metode tatap muka dan digital untuk memastikan efektivitas dan jangkauan yang luas.

Implementasi pendidikan politik di tingkat regional menyesuaikan dengan kondisi sosial dan dinamika politik di masing-masing daerah. Di Jawa Tengah, kegiatan pelatihan dan seminar diorganisasikan oleh pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD), melibatkan anggota pelopor partai dan kader aktif dari berbagai kota dan kabupaten. Program-program tersebut dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun, termasuk sebelum dan sesudah periode Pemilu, sebagai bagian dari strategi konsolidasi kader serta persiapan menghadapi dinamika politik lokal. Tujuan utama dari pendidikan politik ini adalah membekali peserta dengan pemahaman politik yang komprehensif, meningkatkan kemampuan organisasi, serta menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya partisipasi politik yang efektif dan beretika.

Bentuk kegiatan pendidikan politik juga meliputi kolaborasi dengan tokoh partai dan pengurus tingkat nasional melalui seminar, lokakarya, dan safari politik. Materi yang disampaikan mencakup integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik politik modern, teknik komunikasi politik, strategi pengelolaan organisasi partai, serta penerapan nilai-nilai partai dalam kehidupan sosial. Pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan kapasitas kader, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang kritis, teredukasi, dan mampu berperan aktif dalam proses demokrasi, sehingga partisipasi politik di tingkat lokal maupun regional dapat meningkat secara signifikan.